AKAR KEKERASAN:

Keadilan Sosial yang Terpasung[1]

Prof. Dr. H. Nur Syam, MSi[2]

A. Pendahuluan

Dunia ini sesungguhnya masih di dalam bayang-bayang kekerasan sosial. Masih banyak dijumpai gerakan kekerasan yang menggunakan berbagai variable penentunya. Yang baru saja terjadi adalah kekerasan social atau terror yang dilakukan oleh Israel terkait dengan kapal Freedom Flotilla yang mengangkut bahan-bahan bantuan kesehatan yang melibatkan berbagai Negara untuk kepentingan kemanusia bagi warga Palestina di Jalur Gaza.

Penyerangan dan penyanderaan terhadap awak kapal dan tim medis atau relawan bagi bangsa Palestina dari berbagai negera tersebut tentu saja menyentak dunia. Hal itu merupakan gambaran bahwa di dunia ini ternyata masih terdapat kekerasan social yang bisa saja disebut sebagai extra ordinary crime. Bisa dibayangkan bahwa misi bantuan kemanusiaan yang membawa sejumlah bantuan kesehatan dan uang tersebut harus berhadapan dengan senjata api yang melumpuhkan mereka.

B. Kekerasan sebagai Anak Kandung Modernisasi

Kekerasan sosial tidak hidup di dalam dunianya sendiri. Ia tidak lahir dari ranah kosong. Ia adalah anak zamannya. Berbagai peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan yang semakin terbaratkan (*westernized*), dan memang kecenderungan masyarakat justru larut dalam dinamika kehidupan seperti itu, maka selalu akan memunculkan berbagai sikap dan tindakan kontra barat, meskipun skalanya memang sangat lokal dan terbatas.

Ruang keterbukaan yang dikedepankan di era pos-reformasi akan menjadi ajang bagi persemaian gerakan-gerakan bercorak keras. Nyatanya, berbagai manuver baik religio-politik maupun sosial yang dilakukan oleh kelompok ini nyaris tidak tersentuh oleh payung regulasi yang di era orde baru menjadi alat untuk memberangusnya. Ada kegamangan luar biasa dari negara untuk melakukan repressi terhadap kelompok ini di tengah suasana akan membangun keterbukaan dan demokratisasi di negeri ini. Akibatnya, berbagai sepak terjang gerakan-gerakan keagamaan garis keras, apalagi berbaju agama tidak tersentuh oleh dimensi-dimensi hukum yang semestinya "keras" terhadap tindakan kekerasan.

Sebagai anak kandung budaya barat yang sekular, gerakan kekerasan (social, agama, politik dan ekonomi) telah memakan bapaknya sendiri. Berbagai pengeboman yang dilakukan

---

[1] Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Rangka Dies Natalis ke 6, 18-19 Juni 2010. Sebagai pemakalah lain adalah Prof. Dr. Hamdi Muluk dan Prof. Dr. Yusti Probowati Rahayu.

[2] Pemakalah adalah Guru Besar Sosiologi dan Rektor IAIN Sunan Ampel. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, S2 dan S3 Ilmu Sosial Universitas Airlangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh gerakan terorisme yang belakangan mencuat dengan kuat merupakan gerakan perlawanan yang harus dilakukan. Bukan untuk mengalahkan Amerika dan sekutunya yang memang tidak bisa dikalahkan, namun sebagai peringatan bahwa gerakan kekerasan (social, agama dan ekonomi) ternyata bisa memberi pelajaran kepada negara adidaya agar tidak melakukan gempuran budaya dan politik yang terus menerus terhadap umat Islam, terutama yang rentan secara ekonomi dan politik.

Di dalam kekerasanyang dikaitkan dengan agama, maka tema-tema yang diungkapkan oleh media terutama pasca terjadinya pengeboman selalu menyudutkan umat Islam. Secara tematik, ungkapan itu berbunyi: "Terorisme digerakkan oleh Jamaah Islamiyah, Al-Qaidah dan Islam Garis Keras." Makanya, setiap ada pengeboman terhadap pusat-pusat peradaban barat, maka yang pertama dilakukan oleh barat adalah melakukan gerakan pencekalan dan sweeping terhadap umat Islam. Di Amerika, Inggris, Perancis, Australia dan bahkan di Singapura dilakukan pengetatan terhadap orang Islam, apalagi jika berindikator sebagai Islam garis keras, misalnya terhadap orang Islam berjenggot, berpakaian tradisi Arab dan sebagainya.

Amerika dan sekutunya yang mendengungkan Hak Asasi Manusia, ternyata telah melakukan tindakan yang dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia tersebut. Perang Afghanistan yang tidak kunjung usai, meskipun kelompok Mujahidin menang dan kemudian dapat dikalahkan oleh Kelompok Taliban, hakikatnya adalah terdapat peran Amerika di dalamnya. Perang Afghanistan yang melahirkan gerakan Islam garis keras, yang kemudian menjalar menjadi gerakan teorisme adalah dipicu oleh peran Amerika dan sekutunya yang melakukan tindakan konspirasi untuk menjatuhkan pemimpin negara yang tidak sejalan dengan kebijakan *global game* yang didesain oleh Amerika dan sekutunya.

Perang Afghanistan dan Irak menjadi medium tingginya sentimen keagamaan di kalangan kaum muslimin, terutama kaum fundamentalis atau radikalis. Tingginya sentimen keagamaan tersebut dapat dilihat dari banyaknya alumni perang Afghanistan yang kemudian menjadi martir dalam pengeboman kepentingan barat di berbagai penjuru dunia. Dengan demikian, pemicu gerakan radikalisme dengan corak keberagamaan yang keras, sesungguhnya dipicu oleh realitas bahwa kepongahan Amerika dan sekutunya yang sering memuat kebijakan yang meminggirkan negara Islam dan umat Islam dalam kubangan kesengsaraan yang tidak kunjung usai.

Akibat perang Afghanistan dan Irak hingga kini masih menyisakan masalah yang tidak mudah diuraikan. Perang saudara di Afghanistan hingga sekarang belum tuntas. Perang Irak masih menyisakan masalah, seperti hancurnya infrastruktur ekonomi dan sosial. Belum lagi masalah kemanusiaan yang diakibatkannya. Banyaknya anak yang kehilangan orang tuanya, orang tua kehilangan anaknya, kehilangan saudara dan kerabat yang tidak dengan mudah dapat dilupakan. Beban psikhologis seperti itu akan terus menggelayut di dalam kehidupan masyarakat yang pernah dilanda peperangan. Perang haikatnya adalah penghancuran terhadap peradaban manusia. Dan ini dilakukan oleh negara adi daya yang selama ini disebut sebagai pioneer Hak Asasi Manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekerasan demi kekerasan tersebut hakikatnya adalah tindakan teror yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu dengan tujuan atau target yang jelas, yaitu melawan negara adidaya, umumnya adalah negara sekutu, dan khususnya adalah Amerika Serikat dan Israel. Dalam banyak hal, yang sering menyatakan bertanggung jawab terhadap pengeboman adalah gerakan radikalisme seperti Al-Qaida. Oleh karena itu menjadi *meanstreem* jika terdapat gerakan pengeboman, selalu dikaitkan dengan Al-Qaida dalam jaringan Usamah bin Laden.[3]

Memang, yang sering menjadi sasaran berbagai gerakan nekat kaum agamawan radikal adalah Amerika Serikat yang dianggap melindungi kepentingan Israel. Kebijakan mendua Amerika Serikat dalam menghadapi Israel seringkali ditangkap oleh kaum radikal sebagai gerakan konspirasi yang dilakukan secara rapi dan terstruktur. Amerika yang dalam banyak kesempatan mendengungkan Hak Asasi Manusia (HAM) namun dalam praktek sesungguhnya adalah negara yang paling mengacaukan HAM. Tuduhan terhadap Amerika Serikat yang dilakukan oleh Iran adalah Amerika sebagai *State terrorism*. Terbukti dengan serangan Amerika dan sekutunya terhadap Irak, sebuah negara merdeka dan juga serangan Israel terhadap kelompok Hizbullah di Libanon, yang menyisakan duka di kalangan warga sipil. Libanon menjadi berantakan dan porak poranda karena bombardir yang dilakukan oleh tentara Israel. Sementara itu, Amerika dan sekutunya mendiamkannya, bahkan mensuplai senjata untuk kepentingan politik Israel. Sungguh ironis bahwa negara yang selama ini mengedepankan dan mengutamakan HAM justru yang menghancurkan HAM itu sendiri.

Variabel inilah yang menjadi penyebab utama, mengapa gerakan radikalisme itu semakin tumbuh subur. Kebencian terhadap Amerika dan sekutunya yang terus menerus merusak dan menghancurkan terhadap kekuatan politik di beberapa negara Islam telah menjadi penyebab utama dari kalangan agamawan radikal untuk melakukan perlawanan yang sering tidak seimbang. Misalnya adalah keinginan pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia untuk mengirim sukarelawan ke Libanon dalam rangka membantu Kaum Hizbullah dalam mempertahankan harga diri dan kekuasaannya.[4]

Sikap keras yang ditunjukkan oleh kelompok Islam garis keras, pada dasarnya adalah ketidakberdayaan dalam menghadapi gencarnya serbuan budaya barat yang memang telah memasuki dunia global. Di tengah ketidakseimbangan dalam menghadapi budaya barat tersebut,

---

[3] Berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi berlabel Islam di berbagai negara digambarkan oleh Paul Breman dikaitkan dengan pemahaman tentang ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya jihad yang telah ditafsirkan oleh Sayyid Qutub, Khomaeni hingga Usamah Bin Laden, yang di dalam hal ini disebutnya sebagai *the politics of slaughter* atau politik pembantaian. Periksa Paul Breman, *trror and Liberalism,* (New York: W.W. Norton & Company, 2003), hlm. 103-120

[4] Abu Bakar Baasyir sebagai Amir Majelis Mujahidin Indonesia menyerukan agar setiap negara Islam mengirimkan sebanyak 50 orang sukarelawan jihad ke Libanon untuk menjadi pasukan syahid yang rela mati di medan pertempuran. Dalam komentarnya dia menyatakan jika setiap negara Islam berlaku seperti itu, maka Israel akan dapat dikalahkan. Pro-kontra terhadap gagasan ini kemudian muncul sebab sebagian lainnya menganggap bahwa tindaka itu adalah tindakan bunuh diri, sebab ada banya kendala yang akan dihadapi oleh sukarelawan itu, terutama menghadapi medan perang di Libanon yang sulit dan ancaman senjata Israel yang sangat modern.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka tindakan yang muncul adalah melalui bom bunuh diri, bom mobil dan sebagainya yang sesungguhnya adalah sikap keterdesakan yang tidak tertahankan. Ketika akses melawan tidak seimbang, maka yang muncul adalah keinginan untuk memperoleh balasan di akherat yang menjanjikan. Mati syahid berpahala surga, sebab harga surga tidak seimbang dengan hanya sedekah, membantu masjid, madrasah dan membantu orang miskin, sebab surga itu hanya seimbang dengan perbuatan perang ofensif sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf yang saleh.[5]

Kebencian itu tentunya didasari oleh realitas dunia timur yang terpuruk (*under developed*) sedangkan dunia barat yang maju (*developed*). Sebagian negara-negara timur adalah negara miskin yang secara ekonomi, politik dan sosial sangat tergantung kepada negara-negara barat. secara ekonomi negara-negara timur sangat tergantung kepada bantuan (baca hutang) negara-negara donor khususnya negara-negara Eropa. Sebagai akibatnya, negara-negara timur justru terperangkap di dalam jaring-jaring hutang yang tidak mudah diselesaikan. Ketergantungan semakin menguat sebagai akibat keterpurukan ekonomi global yang melanda negara-negara di dunia. Akibatnya, kebencian itu ditimpakan kepada negara-nagera barat yang dianggapnya sebagai biang keladi kehancuran ekonomi, sosial dan politik di negara-negara timur, khususnya negara-negara Islam. Dengan demikian, barat yang sesungguhnya pernah belajar ke timur justru di saat negara-negara timur terpuruk justru didayagunakan untuk mengeruk keuntungan untuk kelompoknya sendiri.

Secara historis, dunia barat adalah murid dunia timur. Jika dirunut sesungguhnya barat bisa menjadi maju adalah kelanjutan dari perkembangan dunia timur. Ketika dunia barat masih terlelap dengan mimpi-mimpinya, maka dunia timur yang diwakili oleh pusat-pusat budaya Islam telah mengembangkan ilmu pengetahuan yang sangat maju. Kemajuan ilmu pengetahuan tersebut bercorak multidispliner. Ilmu filsafat, kedokteran, fisika, kimia dan sosiologi telah berkembang sangat pesat. Ilmu kedokteran dikembangkan oleh Ibu Sina, yang tidak hanya ahli di bidang kedokteran tetapi juga ahli filsafat. Ibnu Khaldun ahli dibidang sosiologi dan sejarah, Ibnu Rusydi ahli dibidang filsafat, kemudian Ibn Tufail ahli dibidang filsafat, Khawarizmi ahli di bidang matematika, dan sebagainya.

Sayangnya, kehebatan ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh ilmuwan Islam ini harus terhenti seirama dengan semakin lemahnya kekuatan politik kerajaan-kerajaan Islam. Islam di semenanjung Eropa harus tunduk kepada kekuatan barat, kerajaan Islam Abbasiyah yang berpusat di Baghdad harus tunduk pada kekuatan orang Mughal, Jengish Khan. Runtuhnya dominasi kerajaan Islam di Timur Tengah tersebut membawa konsekuensi runtuhnya dominasi ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Kejayaan ilmu pengetahuan tersebut kemudian secara perlahan tetapi pasti diwarisi oleh dunia barat. secara perlahan temuan-temuan ilmuwan Islam tersebut diadopsi oleh ilmuwan barat sehingga dunia baratlah yang kemudian menjadi pewaris peradaban ilmu pengetahuan Islam.

---

[5] Imam Samudra, *Aku Melawan Teroris..*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dunia Islam semakin melemah sebagai akibat dari penetrasi dan aneksasi yang dilakukan oleh gerakan imperialisme yang dilakukan barat. Melalui penemuan kapal-kapal besar, maka orang barat melakukan pelayaran yang tidak kunjung henti, sehingga ditemukanlah daerah-daerah kaya –memiliki sumber daya alam melimpah—yang kemudian satu persatu daerah itu direbut dan dikuasainya. Tidak hanya dijadikan sebagai daerah jajahan secara ekonomis tetapi juga dijadikan sebagai jajahan budaya. Melalui semboyan *modernisasi*, maka secara tidak langsung mereka melakukan gerakan westernisasi atau pembaratan. Budaya timur dianggap sebagai budaya rendah dan budaya barat dianggap tinggi. Apa yang berasal dari barat adalah baik dan apa yang ada di timur adalah kurang baik. Stereotipi semacam itu dapat dijumpai di hampir semua daerah yang dijajah oleh barat. Gerakan westernisasi secara simultan bersentuhan dengan gerakan modernisasi.

Agar timur maju dan berkembang, maka harus menjadi modern. Untuk kepentingan itu, negara-negara timur harus dijadikan sebagai proyek modernisasi. Makanya, paradigma modernisasi menjadi *mainstream* di hampir seluruh negara berkembang. Kecuali beberapa negara di Amerika Latin yang menerapkan model pembangunan yang berciri khas, yaitu teori ketergantungan,[6] maka negara-negara di Asia dan Afrika mengadopsi model pembangunan yang bertumpu pada teori modernisasi. Teori ini memang pernah sukses di negara-negara barat pasca perang dunia I. Namun demikian, impor teori modernisasi di negara berkembang ternyata mengalami kegagalan disebabkan oleh budaya dan konteks sosial yang berbeda. Model pembangunan berbasis modernisasi menuai kegagalan di negara berkembang, yang sering disebut sebagai kisah sukses yang gagal.

Sekularisasi semula memang merupakan ide cemerlang, sebab ketika dominasi gereja terhadap urusan duniawi demikian mencengkeram, maka muncullah gagasan agar urusan duniawi yang profan menjadi urusan institusi profan, sedangkan hal-hal yang terkait dengan Yang Sakral diurus oleh gereja. Dominasi gereja tersebut juga berimplikasi terhadap semakin menguatnya institusi kependetaan, sehingga tidak ada lagi pemisahan antara gereja dan negara, gereja dan ekonomi, gereja dengan politik dan sebagainya. Akibatnya, gereja begitu *powerfull*, sehingga otoritasnya melebihi legalitas yang seharusnya diurus. Namun demikian, dalam perkembangan berikutnya sekularisasi menjadi ajang bagi pengingkaran terhadap kehadiran Yang Sakral tersebut.[7]

---

[6] Teori ketergantungan (*dependency theory*) mula pertama digagas oleh Andre Gunder Frank, yang komponen inti teorinya adalah adanya modal asing, pemerintah lokal di negara-negara satelit dan adanya kaum borjuasi. Menurut teori ini bahwa rakyat lebih banyak dirugikan, sebab yang terjadi adalah: kehidupan ekonomi yang tergantung, adanya kerjasama antara modal asing dengan borjuasi lokal atau klas-klas yang berkuasa di negara satelit dan terjadinya ketimpangan antara yang kaya dan miskin. Periksa Arif Budiman, T*eori Pembangunan Dunia Ketiga,* (Jakarta: Gramedia, 1995), hlm. 67

[7] Konsep Sakral dan profan mengacu kepada pandanan Emile Durkheim bahwa yang sakral itu ditandai dengan persoalan-persoalan yang bercorak keilahian dan yang profan adalah persoalan yang bercorak keduniawian. Periksa Emile Durkheim, *The Elementary Form of The Religious Life*. (London: George Unwin Ltd., 1976), hlm. 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modernisasi juga beranak-pinak berbagai macam perilaku yang hakikatnya bertentangan secara diametral dengan budaya Islam. Munculnya berbagai macam tempat hiburan, bahkan hiburan malam, pelacuran, dan perilaku menyimpang lainnya yang menyertai modernisasi akhirnya menjadi faktor pendorong bagi munculnya ketidakpuasan terhadap model pembangunan berbasis modernisasi, dan ingin mengembangkan model baru yang berbasis syariah, baik dalam sistem pemerintahan, politik maupun pembangunan. Kegagalan pembangunan ini direspon oleh kalangan Islam fundamental dengan berargumentasi bahwa lemahnya dasar moralitas dan kesalahan sistem politik, pemerintahan dan pembangunanlah yang menyebabkannya. Makanya, secara intensif di mana dan kapan saja mereka mendengungkan khilafah Islamiyah dan penerapan syariat Islam sebagai solusi bagi penyelesaian masalah bangsa. Sistem kekhalifahan dan syariat Islam dianggap sebagai satu-satunya jalan bagi penyelesaian krisis multidimensi.

2. Kekerasan sebagai Anak Kandung Kebijakan Berstandar Ganda

George Orwell, pada tahun 1984 pernah membuat suatu konsep yang disebutnya sebagai *doublethink*, untuk menggambarkan tentang apa yang dikatakan seseorang sesungguhnya adalah kebalikan dari apa yang dinyatakannya tersebut.[8] Konsep ini sangat menarik ditengah suasana ketidakmenentuan wacana di tengah kehidupan sosial, politik dan agama dewasa ini. Wacana yang sesungguhnya dipercaya sebagai kebenaran ternyata adalah kesebalikannya. Orang tidak boleh percaya kepada sesuatu yang dinyatakan, tetapi harus menemukan kebenaran atau ketidakbenaran wacana tersebut di dalam praktik sehari-hari kehidupan sosial, politik dan agama. Di sinilah, teks sosial, seperti Hak Asasi Manusia, Terorisme, Kekerasan Agama, Radikalisme, dan bahkan Jihad memiliki makna yang sangat terdiversifikasi sedemikian rupa. *Doublespeak* atau *doublethink* relevan untuk mengkaji berbagai wacana sosial, terutama perilaku politik Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya di dalam kancah kehidupan sosial-politik. Contoh yang relevan adalah tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebijakan *Doublestandard* Amerika Serikat terhadap Israel.

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang. Jika dirunut, dapatlah ditemukan bahwa pemikiran tentang HAM sudah ada semenjak para pemikir Yunani Kuno mengembangkan cara berpikir untuk mencari kebenaran dan keadilan. Pemikiran lebih tajam dikemukakan oleh Cicero yang menyatakan bahwa agama, ras, pandangan hidup dan sebagainya tidak menghalangi orang untuk hidup yang aman dan damai yang didasari oleh hukum alam. Kemudian pada abad pertengahan, Thomas Hobbes mengemukakan pandangannya bahwa negara yang telah memperoleh kekuasaannya melalui rakyat haruslah menjadi penjaga bagi keamanan dan perlindungan kepada rakyat. Baginya, masyarakat yang berada di luar sistem dan struktur

[8] Sheldon Rampton dan John Stauber, *Weapons of The Mass Deception…*, hlm. 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan selalu berada di dalam semua lawan semua. Apabila negara tidak mampu memberikan perlindungan sebagai tanggungjawabnya, maka rakyat bisa menggantinya.[9]

Amerika Serikat merupakan negara yang menganggap dirinya sebagai pembela Hak Asasi Manusia (HAM). Propaganda yang dilakukan Amerika Serikat melalui berbagai media informasi di mana dan kapan saja adalah mendengungkan hal tersebut. Memang, secara historis, Amerika adalah negara yang memproklamirkan tentang *Human Right* pada saat negara ini berada di dalam transisi menuju demokrasi. Makanya, melalui ungkapan *human right* itulah Amerika mengklaim bahwa negaranya adalah pendekar dalam penegakan HAM di dunia.

Di dalam realitas politik, Amerika Serikat justru sering melakukan tindakan politik yang tidak mencerminkan pembelaan HAM. Dalam banyak kasus, terutama yang menyangkut kepentingan Israel, maka yang terjadi justru pengelabuan secara nyata tentang pelanggaran HAM. Jika tindakan politik *againts humanity* itu dilakukan oleh kelompok yang berlabel Islam, maka secara lantang Amerika menyatakan sebagai pelanggaran HAM. Namun jika yang melakukannya adalah Israel, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM, tetapi sebagai cara untuk menumpas terorisme yang berada di sebuah negara. Serangan Israel terhadap Libanon dengan dalih memerangi kaum teroris Hamas adalah contoh nyata tentang pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel tetapi wacana yang dikembangkan adalah sebagai tindakan anti terorisme. Aneksasi terhadap Irak sebagai negara merdeka adalah tindakan nyata mengenai pelanggaran politik tingkat tinggi. Namun kenyataannya wacana yang dikembangkan adalah mengenyahkan rezim otoriter dan pembebasan rakyat dari cengkeraman pemerintah yang tiranis.

Israel, sesungguhnya adalah *state terrorism.* Dalam pandangan penduduk Palestina dan juga Libanon bahwa Israel adalah negara teroris yang tidak segan melakukan tindakan kekerasan untuk mencapai tujuan politiknya. Dalam penyerbuan terhadap Libanon, sesungguhnya adalah sebuah serangan untuk melenyapkan gerakan Hizbullah yang dianggap oleh Israel sebagai gerakan anti Zionisme. Sehingga dengan lenyapnya Hizbullah, maka berarti musuh utama Israel di Libanon akan menjadi berkurang. Anehnya, serangan Israel terhadap rakyat sipil Libanon seperti itu tidak mengusik Amerika Serikat dan negara barat lainnya untuk melakukan kutukan terhadap Israel. Dalih menghancurkan gerakan terorisme ternyata menjadi wacana penting mengalahkan pembunuhan terhadap kaum sipil yang tidak berdosa. Melanggar HAM hanyalah sebuah *doublespeak* belaka.

C. Kekerasan Sebagai Anak Kandung Kemiskinan

Sesungguhnya Indonesia ini adalah Negara yang sangat kaya. Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia tidak ada taranya di dunia. Sumber bahan tambang sangat besar dan variatif. Sumber

---

[9] Jawahir Thontowi, *Islam, Neo-Imperialisme dan Terorisme, Perspektif Hukum Internasional dan Nasional.* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. xvi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daya fauna dan flora juga sangat bermacam-macam dan banyak. Pantai Indonesia itu terpanjang di dunia dengan sumber daya produktif yang luar biasa. Belum lagi sumber daya alamnya yang sesungguhnya sangat kaya. Dengan demikian, bangsa Indonesia sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi bangsa besar.

Ditinjau dari potensi SDA dan SDM-nya, mestinya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Dari aspek historis, bangsa ini juga pernah menjadi bangsa besar pada masa lalu. Lihatlah hampir semua bangsa besar di masa lalu memiliki cultural heritage yang sangat kuat. Bangsa Mesir dengan piramidanya. Cina dengan tembok pertahanannya. Romawi dengan gereja kunonya, dan sebagainya. Semua bangsa besar memiliki cultural heritage yang menggambarakan kebesarannya itu. Namun demikian untuk menjadi modern dan berwibawa secara eknomis, ternyata tidak tergantung kepada warisan budaya tersebut.

Negara-negara yang tidak memiliki sejarah panjang kemegahan pun ternyata bisa menjadi modern dan berwibawa. Bangsa Amerika adalah bangsa pendatang yang berasal dari Eropa Barat dan kemudian menetap di sana. Mereka datang pasca ditemukannya Benua Amerika oleh Columbus. Dan tergolong baru. Bayangkan dengan bangsa Mesir yang sudah pernah modern pada 3000 tahun sebelum masehi. Mereka dikenal sebagai bangsa Mesir Kuno.

Demikian pula bangsa India yang juga pernah jaya pada masa jauh sebelum masehi. Iran, Yunani, Jepang, Cina dan sebagainya. Bahkan Australia juga diirikan oleh para ekspatriat Eropa dan kemudian menetap di sana. Singapura bahkan lebih unik lagi, sebab sebagai sebuah negara, Singapura barulah muncul di pertengahan abab ke 20.

India, Mesir dan Indonesia yang memiliki sejarah panjang dalam belantara kenegaraan ternyata tidak menjamin sebagai negara yang maju dan sejahtera. Negara ini adalah bagian dari sejumlah negara dunia ketiga yang untuk membangun negaranya butuh bantuan negara asing. Sebagai nengaraketiga, maka tingkat kesejahteraanya juga relatif lebih rendah.

Singapura tentu semua tahu hanyalah negara kecil. Negara kota. Negara tanpa sumber daya alam. Bahkan untuk meluaskan wilayahnya juga harus menguruk pantainya. Pasir yang dipakai untuk memperluas wilayahnya konon dari pasir Indonesia. Negara ini menjadi modern dan sejahtera karena pemimpinnya memiliki visi Singapura yang maju dan sejahtera. Hanya dengan menggantungkan pendapatannya pada kapal dagang yang sandar di pelabuhannya, maka Singapura mengeruk dolar pamasukan uang.

Sungguh sangat disayangkan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia belum dapat didayagunakan secara maksimal untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mar'i Muhammad, Sebenarnya Indonesia sebelum masa krisis tahun 1997, menjadi salah satu model dimana pertumbuhan yang cukup tinggi rata-rata 7% per tahun, diikuti pula oleh penurunan angka kemiskinan yang berarti. Berdasarkan data yang dikeluarkan Bappenas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah penduduk miskin di negeri ini mengalami penurunan yang berarti. [10]

Jika pada tahun 1976 jumlah penduduk miskin mencapai 54,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari total penduduk, maka pada tahun 1981 jumlah penduduk miskin telah dapat diturunkan menjadi 40,6 juta jiwa atau hampir 27% dari total penduduk. Angka ini terus menurun, sehingga pada tahun 1990 jumlah penduduk miskin telah kembali menurun menjadi sekitar 27 juta jiwa atau 15% dari total penduduk. Dan pada tahun 1996, jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,5 juta jiwa atau sedikit di atas 11%.

Di penghujung tahun 1997, kita mengalami krisis yang sungguh parah yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin membengkak kembali, sehingga pada tahun 1998 menjadi hampir 50 juta jiwa atau 24% dari jumlah penduduk. Tetapi dalam tahun-tahun terakhir sejalan dengan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomipun sudah mulai meningkat, maka pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin turun menjadi 38 juta jiwa atau sedikit di atas 18% dari jumlah penduduk. [11]

Menurut catatan BPS, pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin absolut secara nasional sebanyak 37 juta jiwa atau sekitar 17,5% dari total penduduk Indonesia. Dilihat dari komposisi penduduk miskin, maka pada saat ini diperkirakan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan sekitar dua kali jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang miskin yang hidup di perkotaan. Penyumbang terbesar penduduk miskin tetap berada di Jawa, karena padatnya penduduk, kesuburan tanah yang menurun, terbatasnya harga jual hasil panen terutama gabah, serta alternatif sumber penghasilan yang lain sudah semakin sulit untuk ditemukan. [12]

Kemiskinan adalah musuh utama gerakan kekerasan sosial. Maka di mana terdapat kemiskinan, maka peluang terjadinya kekerasan sosial menjadi tinggi. Dan sebaliknya dalam suatu masyarakat yang tingkat kesejahteraannya lebih baik, maka peluang untuk melakukan kekerasan akan tereduksi dengan sendirinya.

Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada kekerasan yang berdiri sendiri, akan tetapi selalu terkait dengan faktor-faktor yang berkait kelindan. Kebijakan double standart yang terkait dengan kegagalan negara untuk menyejahterakan masayarakatnya dan berpadu dengan westernisasi yang berdampak bagi moralitas masyarakat, maka akan menjadikan ladang subur bagi terjadinya gerakan kekerasan.

---

[10] Mar'i Muhammad, "**Anatomi Kemiskinan di Indonesia" dalam Koran Tempo, Senin, 12 Juli 2004**

[11] Mar'i Muhammad, Anatomi Kemiskinan…

[12] Mar'i Muhammad, Anatomi Kemiskinan…

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, jika masyarakat dunia akan meminimalisasikan gerakan kekerasan, baik atas nama sosial, agama, politik dan ekonomi, maka yang diperlukan adalah membangun keadilan bagi seluruh masyarakat bangsa. Selama keadilan sosial masih terkungkung oleh kesenjangan sosial dalam banyak hal, maka selama itu pula kekerasan sosial, agama dan ekonomi akan selalu memperoleh momentumnya.

D. **Kesimpulan**

Modernisasi yang berakibat terhadap kesenjangan antara dunia maju dan Negara berkembang, kesenjangan antara negara kaya dan miskin, kesenjangan antara antara satu negara dengan negara lain dan kesenjangan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, serta terjadinya demoralisasi yang sangat tajam tentu saja akan menjadikan terkoyaknya keadilan. Jika ini terjadi maka akan menyebabkan tumbuhnya gerakan kekerasan baik sosial, agama maupun ekonomi.

Berbagai kebijakan double standart yang dilakukan oleh negara adikuasa terhadap negara lain, terutama negara-negara dunia ketiga dan lebih khusus kepada Negara Palestina di Timur Tengah juga menjadi pemicu bagi berkembangbiaknya gerakan kekerasan sosial. Jika ini masih terus terjadi, maka kekerasan sosial maupun agama juga akan terus terjadi.

Kemudian, kegagalan negara untuk menyejahterakan masyarakat yang berupa masih tingginya angka kemiskinan, terutama di Indonesia, tentu juga akan menjadi pemicu bagi tumbuhkembangnya gerakan kekerasan social dan ekonomi. Jika pemerintah tidak bisa menyejahterakan masyarakatnya, maka juga dikhawatirkan akan terus terjadi gerakan kekerasan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia.

Namun demikian, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah tindakan kekerasan sosial, agama dan ekonomi difasilitasi oleh variabel-variabel yang kompleks. Bisa saja, gerakan kekerasan itu merupakan suatu entitas yang sistemik dan saling meneguhkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id